



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : Angkutan Umum: PR Menggunakan Revitalisasi Terminal
Tanggal : Rabu, 09 Agustus 2017
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 32

Suasana di Terminal Bus Tipe A Pekalongan, Jawa Tengah tidak begitu panas, meskipun jarum jam sudah menunjukkan pukul 14.00 WIB pada Sabtu pekan lalu. Yudi Supriyanto redaksi@bisnis.com Kuntadi, pengunjung Terminal Tipe A Pekalongan, mengaku kaget. Dia menyatakan, suasana itu tidak seperti biasanya. Dirinya baru sadar setelah mengetahui ada pengatur suhu ruangan terpasang di salah satu lajur terminal. Kuntadi juga menyatakan keheranannya ada dua bus antarkota antarprovinsi (AKAP) di terminal itu dengan kondisi yang sangat bagus. Biasanya, bus yang masuk ke dalam terminal dalam kondisi tak terawat dan tidak dilengkapi pendingin udara. Dirinya baru tersadar ketika Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi datang ke Terminal Tipe A Pekalongan untuk melakukan inspeksi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian Perhubungan memiliki pekerjaan tugas baru yaitu mengelola kembali terminal bus tipe A di seluruh Indonesia. Sebelumnya, terminal bus tipe A pengelolaannya ditangani pemerintah daerah. Kini, pekerjaan rumah yang mesti ditangani Kemenhub adalah mengembalikan fungsi utama terminal sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Sayangnya, banyak perusahaan otobus (PO) enggan mengoperasikan busnya masuk terminal karena alasan fasilitas yang jelek dan tidak ada penumpang yang mau ke terminal. Dalam pertemuan dengan pemangku kepentingan di Terminal Tipe A Pekalongan, Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan bus AKAP merupakan salah satu angkutan umum yang layanannya perlu diperbaiki. Alasannya, minat masyarakat yang menggunakan angkutan umum jenis itu terus mengalami penurunan setiap tahun. "Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, popularitas bus semakin menurun," katanya. Saat ini, Kemenhub mendapatkan tugas mengambil alih pengelolaan terminal tipe A di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Budi Karya mengambil langkah strategis guna memperbaiki terminal yang ada serta memperbaiki kualitas layanan bus AKAP. "Kita akan menginventarisasi [permasalahan-permasalahan bus] bersamaan dengan kewenangan daripada pengelolaan terminal tipe A ke pusat," tegasnya. Pada tahap awal, dia meminta kepala terminal memikirkan daya tarik yang dapat dijual agar calon penumpang mau datang ke terminal layaknya masyarakat datang ke pusat perbelanjaan. Menurutnya, langkah perbaikan terminal agar lebih baik akan percuma tanpa ada peran pemerintah daerah atau Kepolisian di daerah yang dapat mendorong penggunaan terminal. Oleh karena itu, dia berharap agar pemda dan Kepolisian ikut andil dalam menertibkan terminal bayangan yang selama ini digunakan oleh bus AKAP untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Secara regulasi, Menhub tengah menyiapkan aturan yang bisa memaksa bus AKAP hanya dapat menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal tipe A. Budi Karya menegaskan keinginan meningkatkan fungsi terminal secara maksimal bukan sesuatu yang aneh. Hal itu, tegasnya, sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka, anggaran miliaran rupiah pun digelontorkan guna melakukan perbaikan terminal tipe A. Untuk renovasi Terminal Tipe A Pekalongan, Menhub menyatakan Kemenhub mengeluarkan dana mencapai Rp9 miliar. WAJIB KE TERMINAL Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Cucu Mulyana menambahkan sedang menyiapkan beleid baru yang akan memaksa bus hanya diperbolehkan menaikkan dan menurunkan penumpang di dalam terminal. "Naik dan turun penumpang, dalam revisinya nanti tidak boleh di polo," katanya. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35/2003 tentang Penyelenggaraan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, tegasnya, angkutan umum bus dapat menaikkan dan menurunkan penumpang dari pool selain dari terminal. Gayung pun bersambut. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan menyambut baik keinginan pemerintah meningkatkan kualitas layanan bus AKAP agar moda transportasi tersebut kembali diminati masyarakat. Namun, dia menyatakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pekerjaan rumah tersebut antara lain angkutan umum ilegal dan minimnya angkutan umum dari dan ke terminal yang menjangkau daerah pemukiman masyarakat. Saat ini, penumpang sudah teredukasi bahwa naik dan turun di pool lebih nyaman dibandingkan naik dan turun di terminal bus. Oleh karena itu, perlu proses untuk kembali meyakinkan masyarakat bahwa naik dan turun di terminal juga nyaman. "Jadi, kalau pemerintah menertibkan kami sebagai pemegang izin trayek resmi harus menurunkan dan menaikkan penumpang di terminal. Sementara yang lain [ilegal] tidak ditertibkan, remuk kami," katanya. Akademisi Universitas Katolik Semarang Djoko Setijowarno mendukung langkah pemerintah melarang bus menaikkan penumpang di pool PO. Namun, dia berharap agar aturan itu tidak diterapkan di DKI Jakarta. Alasannya, dia menegaskan pola tata ruang dan kelancaran arus lalu lintas di DKI Jakarta kurang mendukung. "Harusnya ada terminal tipe A di pusat kota, bukan berada di pinggir kota," katanya. Selain memaksa bus-bus menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal, pemerintah juga harus bertanggung jawab menyediakan angkutan dari dan ke terminal tersebut menuju tempat permukiman.